

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peternakan Unggas

Industri peternakan unggas di Indonesia menjadi salah satu subsektor peternakan yang memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur mendorong perkembangan usaha peternakan melalui penerapan teknologi budidaya, perbaikan manajemen produksi, serta peningkatan kualitas bibit. Produktivitas sektor ini terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya sistem pemeliharaan yang lebih efisien dan dukungan berbagai program pemerintah. Putra dan Sari (2019) menjelaskan bahwa peternakan unggas berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena mampu menyediakan sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat. Kemajuan teknologi pemeliharaan dan manajemen peternakan turut meningkatkan produktivitas ayam ras serta produksi telur. Dukungan pemerintah melalui program vaksinasi dan berbagai kebijakan pengembangan peternakan membantu peternak menghadapi ancaman penyakit unggas dan fluktuasi harga pakan. Sektor ini tetap menghadapi tantangan berupa pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih efektif agar perkembangan peternakan unggas dapat berlangsung secara berkelanjutan (Putra dan Sari, 2019).

Peternakan unggas, meskipun berperan sebagai penyedia utama protein hewani, juga menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius akibat tingginya produksi limbah. Kotoran dan air limbah dari kandang unggas mengandung kadar nitrogen serta fosfor yang tinggi, sehingga berpotensi mencemari air tanah maupun permukaan bila tidak dikelola secara tepat. Di Indonesia, aktivitas peternakan unggas turut menyumbang emisi metana dan amonia yang memperparah perubahan iklim serta menurunkan kualitas udara. Selain itu, ketergantungan pada pakan berbasis jagung dan kedelai dalam jumlah besar turut memicu deforestasi

dan berkurangnya keanekaragaman hayati, terutama di kawasan tropis seperti Sumatra dan Kalimantan (Wijaya dan Santoso, 2021).

Upaya mitigasi dampak lingkungan dalam peternakan unggas menjadi semakin krusial demi tercapainya keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi biogas, misalnya, mampu mengolah kotoran unggas menjadi energi terbarukan sekaligus menekan emisi gas rumah kaca hingga 30–50%. Di Indonesia, pemerintah juga mendorong program integrasi peternakan dengan pertanian (agroforestry) untuk memanfaatkan limbah secara organik serta mencegah terjadinya eutrofikasi di perairan. Kendati demikian, hambatan utama masih terletak pada lemahnya regulasi dan rendahnya kesadaran peternak skala kecil, yang sering mengabaikan penerapan praktik ramah lingkungan karena keterbatasan biaya (Pratama, 2019).

Strategi jangka panjang dalam mewujudkan peternakan unggas berkelanjutan menekankan pada inovasi, seperti pemanfaatan pakan alternatif dari serangga maupun limbah pertanian, guna mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus menekan dampak lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tertutup (closed-loop) mampu menurunkan tingkat pencemaran serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Pada skala nasional, sinergi antara pemerintah, kalangan akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar peternakan unggas tidak hanya menghasilkan produktivitas tinggi, tetapi juga sejalan dengan kelestarian lingkungan serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia 2030 (Hidayat, 2022).

Peternakan unggas, terutama skala besar, memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Salah satu dampak utama adalah pencemaran udara akibat gas amonia dari kotoran ayam, yang menimbulkan bau menyengat dan gangguan kesehatan pernapasan. Intensitas bau biasanya bergantung pada cuaca, arah angin, serta manajemen limbah. Kotoran yang tidak dikelola dengan baik juga menjadi tempat berkembang biaknya lalat yang dapat menularkan penyakit, seperti diare atau kolera. Limbah cair yang merembes ke tanah dapat mencemari air tanah dan sumur warga. Hasil uji di beberapa lokasi menunjukkan tingginya kadar nitrat, fosfat, hingga bakteri *E. coli* dalam air, yang menimbulkan ancaman kesehatan

serius. Dengan demikian, dampak peternakan unggas tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat (Nugroho dan Sari, 2022).

Selain menimbulkan masalah lingkungan, keberadaan peternakan unggas juga membawa dampak sosial dan ekonomi. Di satu sisi, peternakan memberikan peluang kerja, menambah pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa (Widodo dan Nugroho, 2020). Namun, di sisi lain, ketergantungan ekonomi pada peternakan sering menempatkan masyarakat dalam posisi sulit. Warga yang bekerja di peternakan cenderung enggan menyampaikan keluhan karena takut kehilangan pekerjaan (Pratama, 2022).

Perbedaan kepentingan tersebut membentuk dua kelompok di masyarakat, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak keberadaan peternakan. Kelompok yang mendukung menilai peternakan memberikan manfaat ekonomi, sedangkan kelompok yang menolak lebih menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan. Perbedaan pandangan tersebut berpotensi memicu konflik sosial, mengurangi solidaritas masyarakat, serta menghambat proses adaptasi dan kerja sama antar masyarakat.

2.2 Adaptasi Sosial

Adaptasi sosial didefinisikan sebagai proses interaksi proaktif dan berkelanjutan yang bertujuan mencapai penyesuaian diri yang fungsional terhadap tuntutan lingkungan sosial budaya eksternal. Dalam konteks ilmu sosial dan psikologi adaptasi yang berhasil diukur melalui kemampuan individu yang berfungsi secara efektif dan memperoleh kepuasan dalam sistem sosial barunya.

Kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi ini sering kali berkaitan erat dengan konsep resiliensi komunitas, yaitu kapasitas suatu komunitas untuk bertahan, pulih, dan bangkit kembali dari tekanan atau perubahan (Cahyani, 2015). keberhasilan komunitas dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi resiliensi adalah modal sosial, yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, jaringan sosial, serta norma-norma kolektif seperti gotong royong. Modal sosial berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Modal sosial inilah yang menjadi aset krusial

bagi masyarakat Desa Kramat untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan mengambil tindakan kolektif dalam menghadapi dampak peternakan unggas. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana modal sosial ini berperan dalam menentukan bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut adanya kemampuan adaptasi yang kuat dari masyarakat terdampak. Adaptasi ini tidak hanya bersifat pasif atau reaktif, melainkan juga aktif dalam bentuk inovasi sosial, perubahan strategi ekonomi rumah tangga, maupun peningkatan kesadaran ekologis kolektif (Syahputra, 2017).

Keberhasilan adaptasi tidak hanya ditentukan oleh inisiatif masyarakat, tetapi juga oleh peran kelembagaan lokal, seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan pembuat kebijakan yang krusial. Ketika pemerintah desa memiliki regulasi yang jelas terkait zonasi dan pengelolaan peternakan, konflik dapat dicegah sejak awal. Sebaliknya, ketiadaan regulasi dan pengawasan yang lemah dari instansi terkait dapat memperburuk situasi dan membuat masyarakat merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk mengadu (Siregar dan Lubis, 2020).

Tokoh masyarakat juga memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemilik peternakan. Kemampuan mereka untuk memediasi, mengadvokasi kepentingan warga, dan mencari solusi kompromi sangat menentukan apakah adaptasi akan berlangsung secara damai atau konfrontatif. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan lokal adalah faktor kunci dalam adaptasi sosial. Seberapa cepat dan adilnya pemerintah desa merespons keluhan warga dapat menjadi indikator utama keberhasilan adaptasi komunitas (Siregar dan Lubis, 2020).

Berbagai penelitian di Indonesia telah mengkaji isu serupa di lokasi yang berbeda, memberikan wawasan berharga tentang keragaman pola adaptasi. Studi di Jawa Timur menemukan bahwa pemerintah desa yang proaktif dalam mediasi berhasil menyelesaikan konflik, sementara penelitian lain di Sumatera menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi formal memicu eskalasi (Pratama dan Indah 2020). Studi komparatif juga menunjukkan bahwa skala peternakan sangat memengaruhi pola adaptasi masyarakat; peternakan skala kecil cenderung

menghasilkan adaptasi yang lebih kooperatif, sementara peternakan skala besar lebih sering memicu respons konfrontatif (Kusuma dan Wijaya, 2020).

Temuan-temuan ini memberikan gambaran awal bahwa tidak ada satu "solusi universal" untuk adaptasi. Pola adaptasi sangat tergantung pada konteks lokal, termasuk karakteristik peternakan, kekuatan kelembagaan, dan modal sosial komunitas. Adanya variasi ini menegaskan pentingnya penelitian studi kasus yang mendalam untuk memahami dinamika yang spesifik di setiap lokasi, seperti yang akan dilakukan di Desa Kramat.

2.3 Teori Ekologi Manusia

Teori ekologi manusia, yang dipelopori oleh Park dan Burgess, menempatkan komunitas sebagai sistem ekologi yang kompleks di mana manusia dan lingkungannya saling berinteraksi. Perubahan dalam satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Dalam penelitian ini, aktivitas peternakan unggas dipandang sebagai intervensi ekologis yang memengaruhi lingkungan fisik Desa Kramat melalui pencemaran udara, air, serta meningkatnya populasi serangga (Suryanto dan Kusuma, 2020). Perubahan tersebut menuntut masyarakat untuk beradaptasi, mengatur ulang rutinitas, serta menemukan cara baru menghadapi tekanan.

Pendekatan ekologi membantu menelaah hubungan timbal balik masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, baik berupa alam (tanah, air), sosial (jaringan sosial), maupun kelembagaan (pemerintah desa). Misalnya, bau dari kandang dapat membuat warga mengubah pola aktivitas sehari-hari, hingga mempertimbangkan untuk pindah. Teori ini juga menyoroti dinamika antara persaingan dan kerja sama dalam komunitas, baik untuk mengakses sumber daya yang bersih maupun dalam mencari solusi bersama. Dengan demikian, teori ekologi manusia relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Kramat merespons dampak peternakan unggas (Suryanto dan Kusuma, 2020).

2.4 Modal Sosial

Modal sosial, yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam komunitas, adalah aset penting dalam proses adaptasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan modal sosial yang tinggi lebih resilien (tahan banting) dalam menghadapi tekanan lingkungan. Mereka mampu berkoordinasi dengan lebih baik, berbagi informasi, dan memobilisasi sumber daya secara kolektif untuk mengatasi masalah (Nugroho dan Harahap, 2022). Jaringan sosial yang kuat ini dapat menjadi saluran informasi dan dukungan emosional, yang sangat penting bagi warga yang merasa terancam oleh dampak lingkungan.

Resiliensi komunitas dalam konteks ini bukan hanya tentang kemampuan untuk pulih dari gangguan, melainkan juga kemampuan untuk belajar dan mengorganisasi diri untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Modal sosial memfasilitasi proses ini dengan memperkuat ikatan antarwarga dan membangun kapasitas kolektif untuk bertindak. Misalnya, melalui pertemuan rutin warga atau kegiatan keagamaan, masyarakat dapat mendiskusikan masalah, merancang strategi bersama, dan menegakkan komitmen satu sama lain. Tanpa modal sosial yang kuat, upaya adaptasi kolektif akan sulit terwujud dan komunitas cenderung terpecah-belah (Nugroho dan Harahap, 2022).

Dampak lingkungan yang tidak dikelola secara baik dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan berkembang menjadi konflik sosial. Konflik tersebut dapat muncul dalam bentuk keluhan individu maupun aksi protes bersama terhadap aktivitas peternakan. Bau menyengat dan meningkatnya populasi lalat menjadi pemicu utama terjadinya konflik antara warga dan peternak (Siregar dan Lubis, 2020).

Perbedaan kekuatan sosial di dalam masyarakat memengaruhi cara warga merespons konflik yang terjadi. Komunitas yang memiliki jaringan sosial kuat cenderung lebih mudah mengorganisasi penyampaian aspirasi, sedangkan masyarakat dengan modal sosial rendah lebih memilih bersikap pasif. Peran pemerintah desa sebagai mediator diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik agar tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas (Rahma dan Tanjung, 2021).

Keberhasilan adaptasi tidak hanya ditentukan oleh inisiatif masyarakat, tetapi juga oleh peran kelembagaan lokal, seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan pembuat kebijakan yang krusial. Ketika pemerintah desa memiliki regulasi yang jelas terkait zonasi dan pengelolaan peternakan, konflik dapat dicegah sejak awal. Sebaliknya, ketiadaan regulasi dan pengawasan yang lemah dari instansi terkait dapat memperburuk situasi dan membuat masyarakat merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk mengadu (Siregar dan Lubis, 2020).

Tokoh masyarakat juga memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemilik peternakan. Kemampuan mereka untuk memediasi, mengadvokasi kepentingan warga, dan mencari solusi kompromi sangat menentukan apakah adaptasi akan berlangsung secara damai atau konfrontatif. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan lokal adalah faktor kunci dalam adaptasi sosial. Seberapa cepat dan adilnya pemerintah desa merespons keluhan warga dapat menjadi indikator utama keberhasilan adaptasi komunitas (Siregar dan Lubis, 2020).

2.5 Kesenjangan Penelitian

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji dampak lingkungan dan sosial dari peternakan unggas, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman yang lebih terintegrasi. Banyak studi cenderung fokus pada satu aspek saja baik dampak lingkungan, konflik, atau peran pemerintah tanpa mengintegrasikan semua faktor dalam satu analisis komprehensif. Selain itu, penelitian mendalam yang bersifat studi kasus pada konteks lokal spesifik seperti Desa Kramat masih terbatas. Penelitian yang ada jarang menyoroti bagaimana interaksi antara karakteristik sosial masyarakat, kondisi ekonomi, dan peran kelembagaan secara simultan memengaruhi proses adaptasi. Dengan membandingkan dan mengontraskan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan memiliki kontribusi unik dalam literatur sosiologi pedesaan, khususnya terkait isu adaptasi sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan di Desa Kramat, Purbalingga.